HKTI Ingin Impor yang Merugikan Petani Dapat Dihentikan

NERACA

Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menginginkan agar impor berbagai komoditas yang merugikan produksi pertanian lokal di Tanah Air dapat dihentikan sehingga tingkat kesejahteraan petani di Nusantara juga bisa meningkat.

"Setop impor-impor yang merugikan para petani," kata Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional 2019 HKTI di Jakarta, disalin dari Antara.

Untuk itu, Oesman Sapta menegaskan HKTI juga harus mendorong berbagai kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi, ujar dia, saat ini sudah semakin banyak anggota masyarakat termasuk generasi muda yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian.

HKTI pada Februari 2019 lalu juga telah mengirimkan sebanyak 20 duta petani untuk mengirimkan Training of Trainer (ToT) tentang teknologi dan metode pertanian alamiah ke Thailand.

Oesman mengapresiasi arah fokus pemerintah yang membangun infrastruktur pertanian secara merata di berbagai wilayah di Tanah Air. Sebagaimana diwartakan, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor.

"Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik," kata Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor. Ia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor.

Dengan demikian, lanjutnya, jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Sebagai konsekuensinya, ada kalanya produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak. "Ketika harga bergejolak, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut, salah satunya adalah dengan impor," ucapnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebut kebijakan impor seharusnya menjadi opsi terakhir untuk memenuhi fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pangan. "Impor bisa dilakukan, namun menjadi pilihan terakhir ketika produksi minus dan cadangan Bulog sudah tidak bisa diusahakan dari dalam negeri," kata Rusli Abdullah.

Rusli menjelaskan Bulog sebagai lembaga penyangga kebutuhan pangan, membutuhkan minimal 1,5 juta ton untuk cadangan jika terjadi hal-hal mendesak seperti bencana atau gagal panen.

Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mencapai target swasembada pangan menuju kedaulatan pangan di Tanah Air tidak bisa dilakukan secara instan. "Kalau orang menginginkan bisa swasembada, langsung ketahanan pangan, kemudian melonjat menuju kedaulatan pangan dalam sehari dua hari seperti membalikkan tangan, nggak akan mungkin. Perlu proses dan tahapan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta. Dalam 4,5 tahun terakhir masih terkonsentrasi pada infrastruktur. ● munib

NERACA/Widi Supanwedi

PAMERAN RAILWAY TECH INDONESIA : Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) Hermanto Dwiatmoko (kedua kanan) bersama Kasubdit Lalu Lintas Ditjen Perekretaapian, Kementerian Perhubungan Yudi Karyanto Yudi Karyanto (kanan) menerima cinderamata usai menjadi pembicara Indonesia Railway Conference, disela acara peresmian Pameran RailwayTech Indonesia 2019, di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/3). Pameran yang diselenggarakan Global Expo Management bekerjasama dengan Maska tersebut sebagai ajang pameran teknologi dan inovasi terbaru bidang infrastruktur dan sistem perkeretaapian.

NERACA/Antarafoto/Rosiawan Abhe/aew

PERTAMINA GOES TO CAMPUS : Sejumlah mahasiswa mengikuti seminar dalam rangkaian kegiatan Pertamina Goes to Campus 2019 di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3). Pertamina Goes to Campus yang dilaksanakan Pertamina MOR VII Sulawesi bekerja sama Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir (DAPK) Unhas tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman terciptanya energi yang berkelanjutan serta pengetahuan tentang industri energi di kalangan mahasiswa.

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Waktu : pukul 9.30 WIB - selesai
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Dengan acara sebagai berikut :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara Rapat 1 , acara Rapat 2 dan acara Rapat 3 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat Tahunan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektip dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
   Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
   Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.
   Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
   b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120.
   c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu *http://www.bankganesha.co.id*
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Maret 2019
Direksi Perseroan

RESTRIKSI PERDAGANGAN

Sikapi Langkah Diskriminatif Sawit, Pemerintah Kirim Delegasi ke UE

Jakarta – Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit, yang telah dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi. Rencananya pada 7 April 2019, tentunya untuk bertemu dengan parlemen Uni Eropa.

■ NERACA

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagaimana disalin dari Antara. Tujuan delegasi ini adalah memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa, sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya. Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation No C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap scrutinize document dalam waktu dua bulan ke depan. "Rencananya, paling lambat dua bulan, tapi dalam perjalanannya bisa lebih cepat dari dua bulan, jadi kita perlu menyampaikan pandangan dan posisi kita mengenai delegated regulation," ujar Darmin.

Terdapat 10 agenda yang akan dibawa oleh delegasi yang beberapa di antaranya mengenai pengelolaan sawit berkelanjutan, produktivitas minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya, dan penciptaan lapangan kerja.

Darmin mengatakan pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai langkah agar pengelolaan sawit terus berkelanjutan melalui penanaman kembali untuk mendorong produktivitas. "Kita benahi pengelolaan supaya sawit lebih berkelanjutan dengan melakukan replanting secara intensif sejak tahun lalu dan melakukan moratorium pembukaan lahan," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, minyak sawit saat ini mempunyai produktivitas beberapa kali lipat dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya seperti bunga matahari. "Kalau satu hektare tanah ditanami sawit, bisa menghasilkan delapan sampai 10 ton. Kalau yang lain, boleh jadi hanya satu ton. Jadi, bisa delapan sampai 10 kali lipat dari minyak nabati lainnya," ujar Darmin.

Selama ini, pengadaan minyak sawit ini juga telah menciptakan lapangan kerja bagi 17 juta pekerja di Indonesia, sehingga secara tidak langsung memberikan manfaat sosial ekonomi yang besar.

Oleh karena itu, langkah keberatan yang juga disepakati oleh dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia ini, merupakan upaya untuk melawan standar ganda yang diterapkan Uni Eropa.

"Karena ini diskriminatif dan pihak-pihak sana selalu bicara kerja sama multilateralisme, kita juga siap membawa ini ke WTO, karena bisa diuji langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang fair atau proteksionisme dengan berbagai macam tudingan," ujar Darmin.

Kementerian Perdagangan menyederhanakan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya.

"Selain untuk meningkatkan efektifitas, pencabutan Permendag ini untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

Pencabutan Permendag ini tertuang dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya.

Hal tersebut sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/-Per/10/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya.

Pencabutan Permendag ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor komoditas produk kelapa sawit dan turunannya. Permendag Nomor 17 Tahun 2019 berlaku setelah tujuh hari diundangkan yaitu pada 28 Februari 2019.

Sebelumnya, pada Permendag 54 Tahun 2015 Jo Permendag 90 Tahun 2015, setiap pelaksanaan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, diwajibkan dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebelum muat barang.

Verifikasi oleh surveyor meliputi verifikasi administratif dan fisik, penentuan jenis dan spesifikasi teknis, serta kualitas barang melalui analisa di laboratorium. Selanjutnya untuk ekspor komoditas ini akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku tujuh hari sejak diundangkan yaitu pada 1 Maret 2019. ● munib

Komoditas Rempah Sasar Peluang Pasar Ekspor Baru

NERACA

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan komoditas rempah menjadi peluang Indonesia untuk menyasar pasar ekspor baru yang bukan arus utama (mainstream) dalam mendukung ekonomi.

"Jalur rempah ini selaras dengan keinginan Bapak Presiden yaitu ingin mencari pasar non-'mainstream', salah satu yang diharapkan adalah Afrika," kata Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Sosio-Antropologi, Tukul Rameyo Adi di acara International Forum on Spice Route (IFSR) Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Tukul, Afrika ke depan akan dijadikan aliansi perdagangan rempah seperti halnya yang terjadi di masa lampau. "Jadi jalur rempah bisa menjadi besar lagi dan dijadikan sebagai platform aliansi ekonomi seperti yang dilakukan Tiongkok melalui jalur sutera," tuturnya.

Tukul menuturkan aliansi perdagangan rempah dengan Afrika telah diinisiasi dalam Indonesia-Afrika Forum yang digelar 2018 lalu. Dalam forum ekonomi itu, diusulkan agar jalur rempah yang telah mengakrabkan Indonesia dan Afrika bisa kembali diangkat dalam koridor ekonomi.

Diharapkan aliansi perdagangan dengan Afrika dapat membuat komoditas rempah tidak hanya sekadar untuk kepentingan jual beli tetapi bisa mendorong inovasi dan membangkitkan budaya maritim Nusantara.

"Dulu kita berdagang, kita punya budaya rempah. Tapi harus diakui setelah 350 tahun lebih, rempah hanya jadi komoditas jual beli bukan budaya lagi. Ini yang mau kita bangkitkan," katanya.

Pembina Yayasan Negeri Rempah Bram Kushardjanto menegaskan Indonesia punya potensi besar untuk kembali berjaya dengan rempah. "Kita masih yang terbesar sampai saat ini. Masalah penjualan saja yang harus lewat Vietnam atau India, tapi kita tetap produsen terbesar (di dunia)," katanya. Komoditas unggulan Indonesia di antaranya cengkeh, pala, kayu manis hingga kayu aromatik seperti gaharu, gambir, cendana dan kemenyan.

Pembina Yayasan Negeri Rempah Bram Kushardjanto menilai perlu kemauan politik yang keras dari pemerintah untuk bisa mengembalikan kejayaan rempah di Indonesia. "Butuh regulasi dan yang penting itu 'political will', kita mau kembali ke rempah atau tidak," katanya.

Bram menyebut Indonesia berjaya dengan rempahnya sebelum mengenal komoditas tambang dan migas. Dengan rempah, nama Indonesia harum ke penjuru dunia sampai akhirnya dijajah Eropa.

Hingga saat ini, meski bukan menjadi negara pengekspor rempah terbesar dunia, Indonesia masih tercatat sebagai negara produsen rempah terbesar dunia. "Kita masih yang terbesar sampai saat ini. Masalah penjualan saja yang harus lewat Vietnam atau India, tapi kita tetap produsen terbesar," katanya.

Potensi untuk bisa memegang pasar rempah dunia, menurut Bram, masih sangat besar. Terlebih di Asia masih banyak masyarakat yang melakukan ritual sembahyang dengan wewangian aromatik dari rempah.

"Lada, misalnya, kita nomor tiga setelah Vietnam dan India, tapi produsen terbesar tetap Indonesia. Vietnam ladanya sedikit tapi dia ambil dari kita yang harganya tidak bersaing di luar negeri. Padahal kalau mau, kita bisa kontrol harga," tuturnya.

Bram menambahkan, mengembalikan kejayaan rempah akan juga mengembalikan kejayaan maritim nasional. Pasalnya, perdagangan besar tentunya membutuhkan angkutan laut sebagai alat pendukung logistik.

Ketua dewan pembina Yayasan Negeri Rempah Hassan Wirajuda mengatakan International Forum on Spice Route (IFSR) mendukung program pemerintah untuk memajukan dan menguatkan konsep poros maritim. "Yang salah satu elemen pentingnya adalah memajukan budaya maritim," ujar Hassan Wirajuda dalam International Forum on Spice Route (IFSR).

Untuk memajukan budaya maritim, lanjut Hassan, pemerintah harus menengok kembali sejarah masa lalu kemaritiman Indonesia. "Jadi dalam dunia yang moderen mengingatkan kita pada sejarah masa lalu bangsa Indonesia, sebagian gemilang dan gelap khususnya sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa," kata dia.

Hassan mengatakan mereka awalnya berniat berdagang tapi seiring berjalannya waktu mereka menjajah bangsa ini. "Tidak hanya dagang atau mendapatkan sumber rempah-rempah di kepulauan nusantara tetapi pada akhirnya memonopoli rempah dan mengkolonisasi rempah. Yang pada akhirnya menjajah Indonesia dan bangsa-bangsa lain di Afrika," ucap dia.

Karena itu, Hassan mengatakan masyarakat bisa belajar baik dari sisi baik dan buruk masa lalu bangsa ini sebagai upaya untuk memajukan Indonesia. IFSR berlangsung pada 19-24 Maret 2019 di Jakarta. ● munib